

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA AMBON

MENURUT PENGELUARAN

2012-2016



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA AMBON**

BPS - Statistics of Ambon Municipality

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KOTA AMBON
MENURUT PENGELUARAN
2012-2016**



**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA AMBON
MENURUT PENGELUARAN
2012-2016**

ISSN : 2528-1305

No. Publikasi : 81710.1704

Katalog : 9302023.8171

Ukuran Buku : 21 x 28 cm

Jumlah Halaman : halaman/pages

Naskah :

Badan Pusat Statistik Kota Ambon

Gambar Kulit :

Badan Pusat Statistik Kota Ambon

Diterbitkan oleh:

© Badan Pusat Statistik Kota Ambon

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Prohibited to announce, distribute, communicate, and/or copy part or all of this book for commercial purpose without permission from BPS-Statistics Indonesia

Seuntai Kata

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*finacial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Menurut teori ekonomi makro, penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut Lapangan Usaha/*industry*), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDRB menurut Pengeluaran/*expenditure*) serta pendekatan pendapatan (PDRB menurut Pendapatan/*income*). Ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDRB yang sama.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya.

Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Ambon, Agustus 2017
Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Ambon

Ir. CHATERINA H PERSULESSY

Daftar Isi

- Seuntai Kata	i
- Daftar Isi	ii
- Daftar Grafik	iii
- Daftar Tabel	iv
- Daftar Lampiran	vi
- Pendahuluan	1
- Metode estimasi & Sumber Data	4
- Tinjauan Perekonomian Kota Ambon Berdasarkan Data PDRB Pengeluaran Tahun 2012-2016	25
- Perkembangan Agregat PDRB Menurut Pengeluaran Kota Ambon Tahun 2012-2016	45
- Penutup	58
- Lampiran Tabel	60

Daftar Gambar

- Perbandingan PDRB ADH Berlaku dan ADH Konstan 2010
Menurut Pengeluaran Kota Ambon, Tahun 2012-2016

27

<http://ambonkota.bps.go.id>

Daftar Tabel

- PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Ambon, Tahun 2012-2016	26
- PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kota Ambon, Tahun 2012-2016	26
- Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, Kota Ambon Tahun 2012-2016	28
- Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Ambon Tahun 2012-2016	29
- Indeks Implisit PDRB Pengeluaran, Kota Ambon Tahun 2012-2016	30
- Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Ambon, Tahun 2012-2016	31
- Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Ambon, Tahun 2012-2016	32
- Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Ambon, Tahun 2012-2016	33
- Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Ambon, Tahun 2012-2016	34
- Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir LNPRT Kota Ambon, Tahun 2012-2016	35

Daftar Tabel

- Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Pemerintah Kota Ambon, Tahun 2012-2016	36
- Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kota Ambon, Tahun 2012-2016	38
- Struktur PMTB Kota Ambon, Tahun 2012-2016	39
- Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kota Ambon, Tahun 2012-2016	41
- Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Kota Ambon, Tahun 2012-2016	42
- Perkembangan Impor Barang dan Jasa Kota Ambon, Tahun 2012-2016	44
- Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita Kota Ambon, Tahun 2012-2016	47
- Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor, Tahun 2012-2016	47
- Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap PMTB, Tahun 2012-2016	48
- Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir Terhadap PDRB Kota Ambon, Tahun 2012-2016	49

Daftar Tabel

- Rasio Ekspor Terhadap PMTB, Tahun 2012-2016	50
- Rasio PDRB Terhadap Impor Kota Ambon, Tahun 2012-2016	51
- Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Kota Ambon, Tahun 2012-2016	52
- Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Kota Ambon, Tahun 2012-2016	53
- Ratio Perdagangan Internasional Kota Ambon, Tahun 2012-2016	55
- <i>Incremental Capital Output Ratio</i> Kota Ambon, Tahun 2012-2016	57

Daftar Lampiran

- Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Ambon 2012–2016 (juta rupiah)	60
- Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Ambon 2012–2016 (juta rupiah)	61
- Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Ambon 2012–2016 (persen)	62
- Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Ambon 2012–2016 (persen)	63
- Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Ambon 2012–2016 (persen)	64
- Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Ambon 2013–2016 (persen)	65
- Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Ambon 2012–2016 (2010=100)	66
- Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Ambon 2012–2016 (2010=100)	67

Daftar Lampiran

- Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran, Kota Ambon 2012–2016 (2010=100)	68
- Laju Pertumbuhan Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran, Kota Ambon 2013–2016 (persen)	69

<http://ambonkota.go.id>

BAB I

Pendahuluan

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 dan ini tentu akan mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

a. **Menurut Pendekatan Produksi,**

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu : 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Penggalian, 3. Industri Pengolahan, 4. Pengadaan Listrik dan Gas, 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6. Konstruksi, 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor,

8. Transportasi dan Pergudangan, 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 10. Informasi dan Komunikasi, 11. Jasa Keuangan dan Asuransi, 12. Real Estat, 13. Jasa Perusahaan, 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 15. Jasa Pendidikan, 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 17. Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

b. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

c. Menurut Pendekatan Pengeluaran

PDRB menurut pendekatan ini adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari : (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga, (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga, (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

1.2 KEGUNAAN STATISTIK PDRB

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu wilayah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.
4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar daerah/luar negeri.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan luar daerah/luar negeri.
7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

BAB II

Metode Estimasi & Sumber Data

2.1. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

i. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

ii. Konsep dan definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (*United Nations*), sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotika
3. Pakaian dan alas kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya

5. Furniture, perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun karena keterbatasan data, maka 12 COICOP tersebut dikelompokkan kembali menjadi hanya 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sebagai berikut:

- Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);
Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).
- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen diluar wilayah atau diluar negeri (diperlakukan sebagai impor)

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

- Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut)
- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
- Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah dan pembelian rumah.
- Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

iv. Penghitungan PKRT Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per kapita seminggu untuk makanan dan pengeluaran per kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dan jenis pengeluaran tertentu,
- Indeks Harga Konsumen (IHK).

2. Metode penghitungan

Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Susenas. Akan tetapi, karena hasil estimasi data pengeluaran rumah tangga yang berasal dari Susenas cenderung *underestimate* (terutama untuk kelompok bukan makanan dan kelompok makanan jadi), maka perlu dilakukan penyesuaian (*adjustment*). Dalam melakukan *adjustment*, digunakan data sekunder dalam bentuk data atau indikator *suplay* dari berbagai sumber data diluar Susenas. Setelah diperoleh hasil *adjustment*, maka yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan pada data sekunder. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu. Hal ini dilakukan karena hasil penghitungan dari data sekunder dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya, langkah-langkah penghitungan PKRT dapat diringkas sebagai berikut :

1. Estimasi PKRT hasil Susenas:
 - a. Makanan = pengeluaran konsumsi perkapita seminggu x (30/7) x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
 - b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi perkapita sebulan x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
2. Data poin ke 1 dikelompokkan menjadi 7 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas yang mungkin dikontrol secara tersendiri;
3. Terhadap data poin ke 3 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu;
4. Diperoleh nilai PKRT tahun 2010 yang telah di-*adjust*;
5. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota terdekat);
6. PKRT atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke 4 dengan hasil poin ke 5.

2.2. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

i Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumahtangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumah tangga.

Karakteristik unit LNP adalah sbb :

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- Pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- Setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- Kebijakan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- Istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Sosial, Organisasi Profesi, Perkumpulan Sosial/ Kebudayaan/Olahraga/Hobi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Keagamaan dan Organisasi Bantuan Kemanusiaan/Beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh: pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh: upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

iv. Penghitungan PK-LNPRT Tahunan

1. Sumber data

- Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SK-LNP).
Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- Hasil *updating* direktori LNPRT.
Informasi yang diperoleh dari hasil *updating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- Indeks Harga Konsumen (IHK)

2. Metode penghitungan

PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sebagai berikut :

- Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenis-nya dihitung dengan rumus sbb :

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

\bar{x}_{ij} : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

x_{ij} : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

i : Jenis lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$

j : Jenis pengeluaran LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

- Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumusan sbb:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

X : PK-LNPRT Atas Dasar Harga Berlaku

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PK-LNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

2.3. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

i. Pendahuluan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang & jasa maupun aktivitas investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sebagai berikut :

1. Memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dsb. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya

tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

iii. Cakupan

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Kabupaten/Kota mencakup :

- a. PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. PK-Pemerintah Provinsi yang merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. PK-Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- d. PK-Pemerintah Desa/Kelurahan/Nagari yang berada di wilayah Kabupaten/Kota bersangkutan.

iv. Penghitungan PDRB Tahunan

1. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Kabupaten/Kota Tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)
- b. Data realisasi APBD Tahunan (Kemenkeu)
- c. Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- d. Output Bank Indonesia (BI)
- e. Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.

2. Metode Penghitungan

a. PK-P Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Berlaku

Secara umum, PK-P adh Berlaku dihitung menggunakan rumusan berikut :

$$\text{PK-P adh Berlaku} = \text{Output non pasar-penjualan barangdan jasa} + \text{output Bank Indonesia}$$

Output **non-pasar dihitung** dengan pendekatan biaya yg dikeluarkan, yaitu : Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yg dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level Kabupaten/Kota, PK-P Kabupaten/Kota atas dasar harga berlaku, dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah kabupaten/kota itu sendiri+pengeluaran akhir konsumsi seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah kabupaten/kota tersebut + pengeluaran pemerintah Provinsi yang menjadi bagian dari kabupaten/kota yang bersangkutan + pengeluaran pemerintah Pusat yang menjadi bagian dari kabupaten/kota yang bersangkutan.

b. PK-P Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Konstan

Pengeluaran konsumsi pemerintah adh Konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. *Deflator* yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang di budidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

iii Cakupan

PMTB terdiri dari :

1. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property*)

products), dan sebagainya;

2. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya (seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

iv Penghitungan PMTB Tahunan

1. Sumber data

- a. Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Provinsi/Kabupaten/Kota.
- b. Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil dan Rumah Tangga (level provinsi/kabupaten/kota).
- d. Laporan keuangan perusahaan.
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level provinsi/kabupaten/kota.
- f. IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas).
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas dan Air Minum.
- i. Publikasi Statistik Konstruksi.
- j. Data Eksplorasi Mineral dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.

3. Metode penghitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “ arus komoditas”. Dalam hal ini penyediaan atau “*supply*” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai atas dasar harga berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB atas dasar harga konstan, maka PMTB atas dasar harga berlaku tersebut di “*deflate*” (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian diantaranya dialokasikan menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam

bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasikan output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB atas dasar harga berlaku. Untuk memperoleh nilai atas dasar harga konstan adalah dengan mendeflate PMTB (adh Berlaku) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan kedua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara "ekstrapolasi" atau mengalikan PMTB adh Konstan dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB atas dasar harga konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB atas dasar harga berlaku, nilai PMTB atas dasar harga konstan tersebut di "reflate" (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB atas dasar harga konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara.

Pertama, PMTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rician tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit).

Kedua, untuk memperoleh PMTB atas dasar harga konstan adalah dengan cara mendeflate PMTB atas dasar harga berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB atas dasar harga berlaku untuk barang modal tak berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan atas dasar harga berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada

periode sebelumnya. Sedangkan PMTB atas dasar harga konstannya diperoleh dengan mendeflate nilai atas dasar harga berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunannya.

Untuk perangkat lunak, PMTB atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang software. Untuk atas dasar harga konstan diperoleh dengan mendeflate nilai atas dasar harga berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB atas dasar harga konstannya diperoleh dengan cara mendeflate nilai atas dasar harga berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak-langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.
- c. Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

2.5. PERUBAHAN INVENTORI

i Pendahuluan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal.

Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii Konsep dan Definisi

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu,

minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sebagai berikut:

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Berbagai jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir dan gandum.

iv Penghitungan Perubahan Inventori Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah :

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau dari mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD

- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalian;
- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.
- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.
- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI) dan ternak dari Ditjennak Kementan.

2. Metode Penghitungan

Terdapat 2 metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi “korporasi”, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi “komoditas”.

Di lihat dari sisi manfaat-nya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori atas dasar harga berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sbb :

- Menghitung posisi inventori atas dasar harga konstan, dengan cara mendeflate stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- Menghitung perubahan inventori atas dasar harga konstan dengan mengurangkan posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- menghitung perubahan inventori atas dasar harga berlaku dengan menginflate

perubahan inventori adh Konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori atas dasar harga konstan dihitung dengan: a. mendeflate nilai perubahan inventori aatas dasar harga berlaku dengan indeks harga yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah bahwa :

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harganya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara *mark-up*, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia;

2.6. EKSPOR IMPOR

i Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

ii Konsep dan definisi

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

iii Cakupan

Ekspor-Impor pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari kabupaten/kota tersebut
- b. Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari kabupaten/kota tersebut
Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya
- c. Net Ekspor antar daerah
 - Ekspor antar daerah
 - Impor antar daerah

iv Penghitungan Ekspor-Impor Tahunan

1. Sumber data

- a. Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$)
- b. Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$)
- c. Neraca Pembayaran Indonesia dari BI
- d. Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
- e. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang;
- f. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk kabupaten/kota dari hasil survei.
- g. Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia

2. Metode Penghitungan

Ekspor-Impor barang luar negeri dinilai menurut harga *free on board* (fob) dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan Impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented transaction*) baik oleh residen maupun non residen. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.

BAB III

Tinjauan Perekonomian Kota Ambon Berdasarkan PDRB Pengeluaran Tahun 2012 – 2016

Perubahan struktur ekonomi Kota Ambon akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2012 – 2016, tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Kota Ambon digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPRT dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Untuk lebih jelasnya, perilaku masing-masing komponen pengeluaran itu akan diuraikan pada bagian berikut.

3.1. TINJAUAN AGREGAT PDRB KOTA AMBON MENURUT PENGELUARAN

Kondisi perekonomian Kota Ambon dari tahun 2012-2016 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Hal ini terlihat dari PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan arah positif. Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui Nilai PDRB ADHB dan ADHK, serta pertumbuhan pada total PDRB.

**Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran Kota Ambon,
Tahun 2012-2016**
(Juta Rp)

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4.666.999,75	5.262.640,08	6.074.703,72	6.998.691,95	7.754.538,54
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	146.259,47	164.399,55	185.806,69	213.083,09	252.029,49
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.630.586,24	2.831.059,83	3.013.261,00	3.613.287,43	4.057.155,92
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.574.755,95	1.752.049,08	1.935.178,00	2.141.476,08	2.373.830,29
5. Perubahan Inventori	65.944,75	57.104,80	63.170,11	17.730,24	20.424,85
6. Ekspor	2.129.065,48	2.276.947,80	2.194.539,86	2.192.354,53	2.170.337,31
7. Impor	3.373.904,35	3.521.205,46	3.535.469,70	4.124.054,19	4.582.835,68
PDRB	7.839.707,29	8.822.995,67	9.931.189,68	11.052.569,13	12.045.480,72

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Nilai PDRB Kota Ambon (adh berlaku) selama periode tahun 2012- 2016 menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume.

**Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran Kota Ambon,
Tahun 2012-2016**
(Juta Rp)

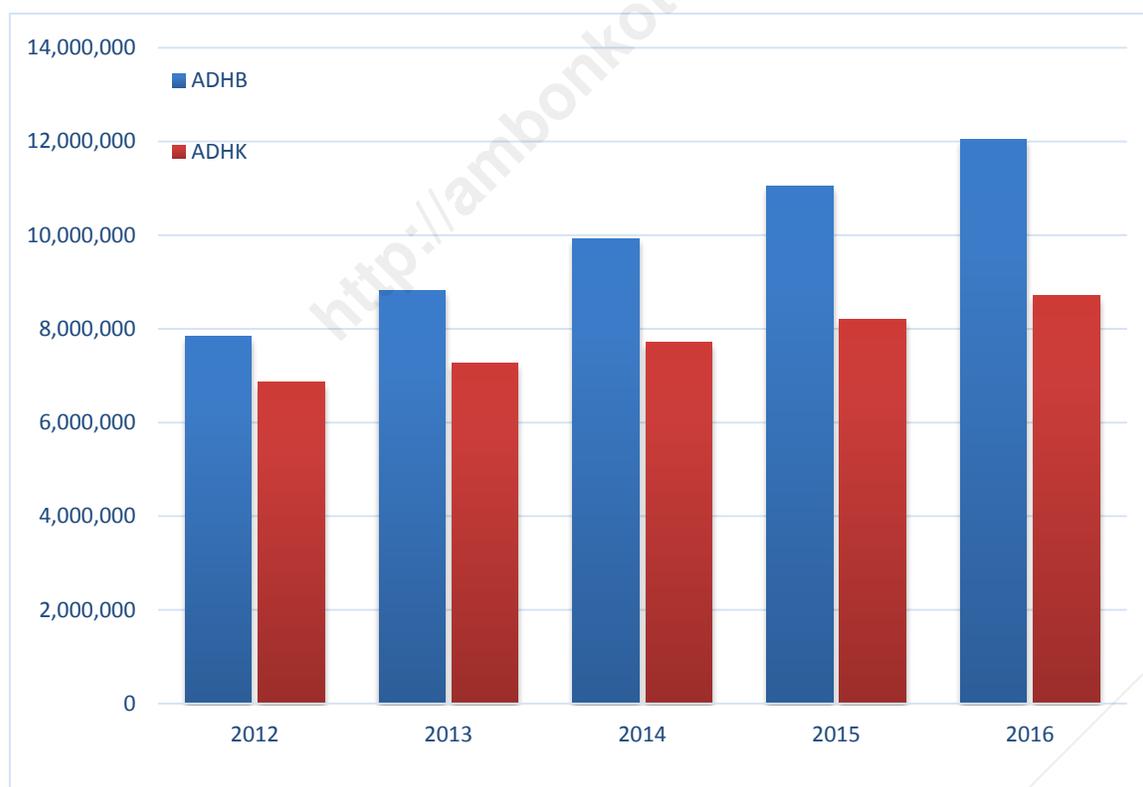
Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3.974.734,45	4.169.048,79	4.493.362,49	4.783.714,47	5.075.954,66
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	134.644,66	140.591,71	152.684,05	164.481,28	180.568,32
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.216.960,12	2.364.577,51	2.470.474,04	2.719.323,31	2.905.293,68
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.378.109,07	1.577.394,96	1.670.705,96	1.752.065,21	1.830.702,72
5. Perubahan Inventori	62.960,41	44.725,55	49.882,46	12.226,16	13.428,21
6. Ekspor	2.070.340,45	2.094.380,41	1.859.606,96	1.847.656,46	1.828.380,14
7. Impor	2.976.414,21	3.116.552,68	2.992.565,81	3.069.462,51	3.133.323,92
PDRB	6.861.334,95	7.274.166,27	7.704.150,15	8.210.004,37	8.701.003,82

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Selain dinilai atas dasar harga berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai atas dasar harga konstan 2010 atau atas dasar harga berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan atas dasar harga konstan, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga/inflasi). PDRB komponen pengeluaran atas dasar harga Konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2012–2016, gambaran tentang perkembangan ekonomi Kota Ambon berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan dapat dilihat pada tabel 2 diatas. Sama halnya dengan PDRB atas dasar harga berlaku, nilai pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga konstan juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Gambar 1. Perbandingan PDRB ADH Berlaku dan ADH Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Ambon Tahun 2012-2016 (Juta Rupiah)



Dari grafik 1, menunjukkan bahwa pada umumnya nilai PDRB atas dasar harga berlaku selalu lebih besar dari nilai PDRB atas dasar harga konstan. Perbedaan tersebut

disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku. Dalam PDRB aatas dasar harga konstan pengaruh faktor harga telah ditiadakan. Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), konsumsi akhir LNPRT (PK-LNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor dikurangi impor.

**Tabel 3. Distribusi PDRB ADHB
Menurut Pengeluaran, Kota Ambon
Tahun 2012-2016
(Persen)**

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	59,53	59,65	61,17	63,32	64,38
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,87	1,86	1,87	1,93	2,09
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	33,55	32,09	30,34	32,69	33,68
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	20,09	19,86	19,49	19,38	19,71
5. Perubahan Inventori	0,84	0,65	0,64	0,16	0,17
6. Ekspor Luar Negeri	27,16	25,81	22,10	19,84	18,02
7. Impor Luar Negeri	43,04	39,91	35,60	37,31	38,05
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Berdasarkan tabel 3 diatas terlihat bahwa selama periode 2012 – 2016, produk yang dikonsumsi di wilayah domestik sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (di atas 50 persen). Ekspor juga mempunyai peran yang relatif besar, sekitar 18 s.d 27 persen, walaupun dari tahun 2012 ekspor di Kota Ambon terus mengalami penurunan sampai dengan tahun 2016; demikian halnya impor masih mempunyai peran yang relatif besar, karena sekitar 35 s.d 43 persen permintaan domestik masih dipenuhi oleh produk dari impor. Di sisi lain, pengeluaran untuk kapital (PMTB) juga mempunyai peran cukup besar dengan kontribusi sekitar 19 s.d 20 persen. Proporsi konsumsi akhir pemerintah berada pada rentang 30 s.d 33 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik sangat besar. Pada tahun 2012-2016 perdagangan Kota Ambon menunjukkan nilai ekspor lebih rendah dari nilai impor yang menunjukkan dalam kondisi “defisit”.

**Tabel 4. Pertumbuhan PDRB ADHK 2010
Menurut Pengeluaran, Kota Ambon
Tahun 2012-2016
(Persen)**

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	57,93	57,31	58,32	58,27	58,34
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,96	1,93	1,98	2,00	2,08
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	32,31	32,51	32,07	33,12	33,39
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	20,09	21,68	21,69	21,34	21,04
5. Perubahan Inventori	0,92	0,61	0,65	0,15	0,15
6. Ekspor Luar Negeri	30,17	28,79	24,14	22,50	21,01
7. Impor Luar Negeri	43,38	42,84	38,84	37,39	36,01
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kota Ambon tertinggi terjadi pada tahun 2015 yakni sebesar 6,57 persen, sebaliknya yang terendah terjadi pada tahun 2014 (5,91 persen).

**Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Pengeluaran, Kota Ambon
Tahun 2012-2016
(2010=100)**

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	117,42	126,23	135,19	146,30	152,77
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	108,63	116,93	121,69	129,55	139,58
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	118,66	119,73	121,97	132,87	139,65
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	114,27	111,07	115,83	122,23	129,67
5. Perubahan Inventori	104,74	127,68	126,64	145,02	152,10
6. Ekspor Luar Negeri	102,84	108,72	118,01	118,66	118,70
7. Impor Luar Negeri	113,35	112,98	118,14	134,36	146,26
PDRB	114,26	121,29	128,91	134,62	138,44

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sementara itu, indeks implisit¹ PDRB yang menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri) juga menunjukkan peningkatan tiap tahunnya.

3.2. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran. Data berikut menunjukkan hal tersebut.

¹ Indeks perkembangan

Tabel 6. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Ambon, Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (<i>Juta Rp</i>)	4.666.999,75	5.262.640,08	6.074.703,72	6.998.691,95	7.754.538,54
b. ADHK 2010 (<i>Juta Rp</i>)	3.974.734,45	4.169.048,79	4.493.362,49	4.783.714,47	5.075.954,66
Proporsi Terhadap PDRB (% ADHB)	59,53	59,65	61,17	63,32	64,38
Rata-rata konsumsi per kapita/tahun					
a. ADHB (<i>Juta Rp</i>)	12,83	13,86	15,36	17,00	18,12
b. ADHK 2010 (<i>Juta Rp</i>)	10,93	10,98	11,36	11,62	11,86
Pertumbuhan ²					
a. Total konsumsi RT	8,00	4,89	7,78	6,46	6,11
b. Perkapita	3,50	0,51	3,47	2,27	2,06
Jumlah Penduduk (<i>jiwa</i>)	363.771	379.615	395.423	411.617	427.934

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Data tersebut menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2012 – 2016 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal (*adh Berlaku*) maupun riil (*adh Konstan*), sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2012 sampai dengan 2016 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Titik tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu 64,38 persen dan titik terendah terjadi pada tahun 2012 yaitu 59,53 persen.

Secara umum, rata-rata konsumsi per kapita menunjukkan pertumbuhan yang searah dengan kenaikan jumlah penduduk dan selalu diikuti pula oleh kenaikan nilai konsumsinya. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per kapita berfluktuatif, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Sempat melambat untuk ADHK 2010 pada tahun 2013, namun tetap mengalami peningkatan ditunjukkan dengan angka pertumbuhan yang positif. Peningkatan rata-rata konsumsi per kapita secara “riil” pada tahun 2016 dibanding

2012 sebesar 0,93 juta rupiah. Peningkatan ini secara otomatis berpengaruh terhadap perubahan struktur konsumsi rumah tangga.

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga atas dasar harga konstan sebesar 8,00 persen pada tahun 2012. Kemudian melambat pada tahun 2013 pada angka 4,89 persen, namun kembali mempercepat pertumbuhannya menjadi 7,78 persen pada tahun 2014. Namun pada tahun 2015 dan 2016 mengalami penurunan pertumbuhan yaitu 6,46 persen dan 6,11 persen. Sementara itu, konsumsi per kapita tumbuh sebesar 3,5 persen ditahun 2012, sempat berfluktuasi di tahun 2013-2014, dan mengalami penurunan pertumbuhan pada tahun 2015 dan 2016. Nampak bahwa peningkatan keseluruhan konsumsi rumah tangga secara "riil" lebih tinggi dari peningkatan jumlah penduduk yang umumnya berada di kisaran 4 persen. Hal ini mengindikasikan terjadi perubahan tingkat kemakmuran masyarakat, meskipun tidak dapat dijelaskan lebih jauh melalui perangkat data PDRB ini.

Tabel 7. Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Ambon, Tahun 2012-2016³
(Persen)

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	54,37	53,45	53,90	54,34	54,48
b. Pakaian dan Alas Kaki	3,61	3,67	3,71	3,47	3,56
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan RT	10,50	10,82	10,66	10,34	10,45
d. Kesehatan dan Pendidikan	12,99	13,25	13,57	13,55	13,44
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	11,36	11,45	11,02	11,12	11,02
f. Hotel dan Restoran	4,61	4,77	4,53	4,61	4,46
g. Lainnya	2,57	2,59	2,62	2,58	2,59
Total Konsumsi	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Secara rata-rata dari tahun 2012-2016, nampak pada struktur konsumsi akhir rumah tangga Kota Ambon, bahwa konsumsi makanan lebih tinggi dibandingkan konsumsi bukan

makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan cenderung tetap dengan sedikit pergerakan tiap tahunnya. Persentasenya sebesar 54,37 persen pada tahun 2012, sedangkan pada tahun 2016 sebesar 54,48 persen.

Pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan juga semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya. Dari tabel 7 terlihat bahwa hampir semua komponen pengeluaran non makanan persentasenya semakin menurun dari tahun 2012 hingga tahun 2016, namun untuk jasa kesehatan dan pendidikan menunjukkan peningkatan dari 12,99 persen pada tahun 2012 menjadi 13,44 persen pada tahun 2016.

Tabel 8. Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Ambon, Tahun 2012-2016
(Persen)

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	9,37	4,79	9,12	6,04	7,62
b. Pakaian dan Alas Kaki	9,49	4,64	7,68	5,44	7,46
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan RT	4,92	6,10	5,57	5,62	6,62
d. Kesehatan dan Pendidikan	6,57	4,45	7,77	7,44	2,49
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	7,01	4,89	5,32	7,75	6,10
f. Hotel dan Restoran	7,83	5,59	5,17	8,34	(1,21)
g. Lainnya	4,23	3,58	6,10	5,68	3,58
Total Konsumsi	8,00	4,89	7,78	6,46	6,11

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Dilihat dari pertumbuhan “riil” nya, pengeluaran rumah tangga untuk kelompok makanan, minuman dan rokok menunjukkan fluktuasi, dengan masing-masing sebesar 9,37 persen (2012); 4,79 persen (2013) ; 9,12 persen (2014) ; 6,04 persen (2015) dan 7,62 persen (2016). Pertumbuhan “riil” ini menunjukkan adanya perubahan konsumsi rumah tangga dalam bentuk kuantum (volume) dari waktu ke waktu. Secara umum hampir seluruh komponen mengalami pertumbuhan tiap tahunnya meskipun nilainya berfluktuasi, namun pada jasa hotel dan restoran terjadi pertumbuhan negatif (penurunan) pada tahun 2016 sebesar 1,21 persen dari tahun sebelumnya yang pada tahun 2015 mengalami pertumbuhan terbesar untuk kelompok jasa hotel dan restoran. Informasi ini menunjukkan terjadinya peningkatan kemakmuran masyarakat, meskipun mungkin hanya dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu.

Tabel 9. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Ambon, Tahun 2012-2016⁴
(Persen)

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	12,52	5,79	6,67	9,54	3,21
b. Pakaian dan Alas Kaki	2,04	9,46	8,52	2,09	6,01
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan RT	10,36	9,57	7,68	5,84	5,03
d. Kesehatan dan Pendidikan	6,82	10,14	9,67	7,09	7,23
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	4,68	8,40	5,50	7,84	3,48
f. Hotel dan Restoran	7,25	10,47	4,17	8,19	8,62
g. Lainnya	9,02	9,91	9,88	7,35	7,40
Total Konsumsi	9,87	7,51	7,10	8,22	4,42

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

⁴ Tingkat perubahan harga produk konsumsi

Tabel 9 menunjukkan pertumbuhan implisit yang fluktuatif setiap tahunnya untuk setiap kelompok konsumsi. Peningkatan harga (inflasi) tertinggi terjadi pada tahun 2012. Komponen Makanan dan Perumahan menjadi penyumbang utama tingginya inflasi pada tahun tersebut. Dilihat selama periode tahun 2012-2016, terjadi pergeseran kelompok penyumbang inflasi dari makanan dan perumahan pada tahun 2012, menjadi kesehatan, pendidikan hotel dan restoran yang perubahannya dimulai pada tahun 2013 hingga tahun 2016. Pada tahun 2016 sebaran peningkatan harga sudah lebih seimbang dibandingkan pada tahun 2012. Peningkatan harga pada tahun 2016 juga merupakan yang terendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

3.3. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Konsumsi akhir LNPRT peranannya dalam PDRB menurut pengeluaran sangat minor dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah semestinya dapat lebih ditingkatkan lagi. Data berikut menunjukkan hal tersebut, dimana hal tersebut dapat dilihat dari proporsinya terhadap PDRB yang minor.

Tabel 10. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir LNPRT Kota Ambon, Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (<i>Juta Rp</i>)	146.259,47	164.399,55	185.806,69	213.083,09	252.029,49
b. ADHK 2010 (<i>Juta Rp</i>)	134.644,66	140.591,71	152.684,05	164.481,28	180.568,32
Proporsi Terhadap PDRB (% ADHB)	1,87	1,86	1,87	1,93	2,09

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Proporsi LNPRT Kota Ambon seperti yang tersaji pada tabel 10 di atas berkisar antara 1,86 persen hingga 2,09 persen. Meskipun mengalami peningkatan secara absolut, namun proporsi komponen ini menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Hal ini tentu saja dipengaruhi oleh penambahan yang terjadi pada komponen pengeluaran lainnya. Tercatat

pada tabel di atas bahwa pada tahun 2016 meskipun nilai LNPRT meningkat cukup signifikan dan tertinggi dalam periode 5 tahun terakhir, namun proporsi yang disumbangkan pada tahun tersebut merupakan yang terendah selama periode tersebut.

3.4. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan pengeluaran akhir rumah tangga dan LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian suatu wilayah. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian Kota Ambon serta bagaimana perkembangannya akan dijelaskan dalam uraian dibawah ini :

Tabel 11. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Pemerintah Kota Ambon, Tahun 2012-2016⁵

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (<i>Juta Rp</i>)	2.630.586,24	2.831.059,83	3.013.261,00	3.613.287,43	4.057.155,92
b. ADHK 2010 (<i>Juta Rp</i>)	2.216.960,12	2.364.577,51	2.470.474,04	2.719.323,31	2.905.293,68
Proporsi Terhadap PDRB (% ADHB)	33,55	32,09	30,34	32,69	33,68
Konsumsi Pemerintah per kapita					
a. ADHB (<i>Juta Rp</i>)	7,23	7,46	7,62	8,78	9,48
b. ADHK 2010 (<i>Juta Rp</i>)	6,09	6,23	6,25	6,61	6,79
Pertumbuhan ⁵					
a. Total konsumsi pemerintah	8,93	6,66	4,48	10,07	6,84
b. Konsumsi perkapita	4,39	2,21	0,30	5,74	2,77
Jumlah Penduduk (<i>jiwa</i>)	363.771	379.615	395.423	411.617	427.934

* *Angka Sementara*

** *Angka Sangat Sementara*

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik untuk atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2012 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku sebesar 2630,58

⁵ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

miliar rupiah, kemudian meningkat terus hingga pada tahun 2016 nilainya mencapai 4057,15 miliar rupiah. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah atas dasar harga Konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Jika dicermati lebih lanjut, proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB juga mengalami fluktuasi dalam 5 tahun terakhir, dimana sepanjang periode tersebut, proporsi terendah terjadi pada tahun 2014 yakni 30,34 persen; sedangkan proporsi tertinggi pada tahun 2016 yang mencapai 33,68 persen.

Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan kepada masyarakat. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per kapita. Pada tahun 2012 konsumsi pemerintah per kapita atas dasar harga berlaku sebesar 7,23 juta rupiah, dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai 9,48 juta rupiah pada tahun 2016.

Rata-rata konsumsi pemerintah per kapita atas dasar harga konstan (2010) juga meningkat setiap tahunnya. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya peningkatan pengeluaran konsumsi pemerintah secara kuantitas. Walaupun pengeluaran konsumsi pemerintah meningkat setiap tahun namun dengan kecepatan yang berbeda-beda. Hal itu tergambar dari laju pertumbuhannya yang sebesar 2,21 persen pada tahun 2013; 0,3 persen pada tahun 2014; 5,74 pada tahun 2015 dan 2,77 persen pada tahun 2016.

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara "riil" menunjukkan peningkatan baik secara keseluruhan maupun rata-rata (per penduduk). Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas penggunaan sumber daya finansial oleh pemerintah.

Tabel 12. Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kota Ambon, Tahun 2012-2016⁶

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Akhir (belanja pemerintah) ⁶ (Juta Rp)	2.630.586,24	2.831.059,83	3.013.261,00	3.613.287,43	4.057.155,92
Pertumbuhan riil (ADHK2010) (%)	8,93	6,66	4,48	10,07	6,84
Pertumbuhan Indeks Harga implisit ⁷ (%)	0,71	0,90	1,87	8,94	5,10

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah Kota Ambon menunjukkan peningkatan tiap tahunnya dengan pertumbuhan yang selalu positif dengan nilai pertumbuhan yang berfluktuasi. Pertumbuhan riil yang terbesar pada tahun 2015 sebesar 10,07 persen. Hal ini disebabkan pada tahun tersebut juga terjadi peningkatan harga yang ditunjukkan oleh pertumbuhan indeks harga implisitnya sebesar 8,94 persen.

3.5. PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)⁸. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

⁶Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku /ADHB)

⁸ Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

**Tabel 13. Struktur PMTB Kota Ambon,
Tahun 2012-2016**

Uraian (1)	2012 (2)	2013 (3)	2014 (4)	2015* (5)	2016** (6)
Total PMTB					
a. ADHB (<i>Juta Rp</i>)	1.574.755,95	1.752.049,08	1.935.178,00	2.141.476,08	2.373.830,29
b. ADHK 2010 (<i>Juta Rp</i>)	1.378.109,07	1.577.394,96	1.670.705,96	1.752.065,21	1.830.702,72
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	20,09	19,86	19,49	19,38	19,71
Struktur PMTB ⁹					
a. Bangunan (<i>Juta Rp</i>)	1.150.606,33	1.299.585,53	1.432.349,12	1.570.755,71	1.732.386,70
(%)	73,07	74,18	74,02	73,35	72,98
b. Non Bangunan (<i>Juta Rp</i>)	424.149,62	452.463,56	502.828,88	570.720,37	641.443,59
(%)	26,93	25,82	25,98	26,65	27,02
Total PMTB (<i>Juta Rp</i>)	1.574.755,95	1.752.049,08	1.935.178,00	2.141.476,08	2.373.830,29
(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan ¹⁰ (%)					
a. Bangunan	19,71	18,09	6,81	4,42	4,42
a. Non Bangunan	23,04	5,78	3,52	6,11	4,67
Total PMTB	20,67	14,46	5,92	4,87	4,49

* *Angka Sementara*

** *Angka Sangat Sementara*

Selain peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga maupun pemerintah), PMTB juga menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun riil. Data di atas menjelaskan bahwa secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2012– 2016 turun dari 20,67 persen (2012) menjadi 4,49 persen (2016). Walaupun nilai PMTB selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya, ditunjukkan dengan pertumbuhan yang selalu positif, namun pertumbuhannya selalu melambat tiap tahunnya. Pertumbuhan PMTB pada masing-masing komponen sangat bervariasi antar tahunnya. Sub komponen bangunan merupakan komponen dengan proporsi terbesar dalam pembentukan modal tetap.

Proporsi non bangunan terhadap total PMTB relatif stabil pada kisaran 25-27% selama periode 2012–2016 (tabel 13). Pertumbuhan “riil” sub komponen bangunan pada tahun 2012 sebesar 19,71 persen. Namun kemudian melambat di tahun 2013 dengan

⁹Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku /ADHB)

¹⁰ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

pertumbuhan sebesar 18,09 persen dan kembali melambat menjadi 4,42 persen di tahun 2016.

Secara umum, selama kurun waktu tahun 2012-2016 pertumbuhan PMTB mengalami penurunan di mana pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012 yang mencapai besaran angka 20,67 persen dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu hanya sebesar 4,49 persen. Selain itu, share PMTB terhadap total PDRB juga mengalami penurunan dari tahun 2012 sebesar 20,09 persen menjadi 19,71 persen pada tahun 2016.

<http://ambonkota.bps.go.id>

3.6. PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “**persediaan**” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Tabel 14. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kota Ambon, Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (<i>Juta Rp</i>)	65.944,75	57.104,80	63.170,11	17.730,24	20.424,85
b. ADHK 2010 (<i>Juta Rp</i>)	62.960,41	44.725,55	49.882,46	12.226,16	13.428,21
Proporsi Terhadap PDRB (% ADHB)	0,84	0,65	0,64	0,16	0,17

* *Angka Sementara*

** *Angka Sangat Sementara*

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah, bahwa proporsi dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif). Rasio tertinggi terjadi di tahun 2012 yaitu sebesar 0,84 persen, sedangkan rasio terendah terjadi tahun 2015 yaitu 0,16 persen.

3.7. PERKEMBANGAN EKSPOR BARANG DAN JASA LUAR NEGERI

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik, tetapi dikonsumsi oleh pihak luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

Tabel 15. Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Kota Ambon, Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Ekspor					
a. ADHB (<i>Juta Rp</i>)	2.129.065,48	2.276.947,80	2.194.539,86	2.192.354,53	2.170.337,31
b. ADHK 2010 (<i>Juta Rp</i>)	2.070.340,45	2.094.380,41	1.859.606,96	1.847.656,46	1.828.380,14
Proporsi Terhadap PDRB (% ADHB)	27,16	25,81	22,10	19,84	18,02
Pertumbuhan¹¹ (%)	18,48	1,16	(11,21)	(0,64)	(1,04)

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Secara total, nilai ekspor atas dasar harga berlaku tahun 2016 menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2012 ekspor mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2012, nilai ekspor mencapai 2070 milyar rupiah, selanjutnya tahun 2013 mengalami sedikit kenaikan menjadi 2.094 milyar rupiah. Sedangkan pada tahun 2014 terjadi penurunan nilai ekspor yang terbesar dalam kurun waktu lima tahun terakhir dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2016. Nilai ekspor atas dasar harga konstan 2010 menunjukkan pola yang sama dengan nilai ekspor atas dasar harga berlaku. Proporsi ekspor terhadap total PDRB Kota Ambon yang terbesar terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 27,16 persen. Sedangkan proporsi terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 18,02 persen.

Pertumbuhan riil total ekspor mencapai angka yang cukup tinggi, khususnya pada tahun 2012 mencapai 18,48 persen. Sementara itu pertumbuhan minus terjadi pada tahun

¹¹ Diturunkan dari perhitungan PDRB (ADHK 2010)

2014 (minus 11,21 persen) ; tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 0,64 persen dan di tahun 2016 kembali mengalami penurunan sebesar 1,04 persen.

3.8. PERKEMBANGAN IMPOR BARANG DAN JASA LUAR NEGERI

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Indonesia. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongannya bisa berbeda dengan ekspor.

Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor menunjukkan semakin kuatnya ketergantungan Indonesia terhadap ekonomi atau produk negara lain. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Indonesia di luar negeri, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa).

**Tabel 16. Perkembangan Impor Barang dan Jasa
Kota Ambon, Tahun 2012-2016**

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Impor					
a. ADHB (<i>Juta Rp</i>)	3.373.904,35	3.521.205,46	3.535.469,70	4.124.054,19	4.582.835,68
b. ADHK 2010 (<i>Juta Rp</i>)	2.976.414,21	3.116.552,68	2.992.565,81	3.069.462,51	3.133.323,92
Proporsi Terhadap PDRB (% ADHB)	43,04	39,91	35,60	37,31	38,05
Pertumbuhan¹² (%)	21,80	4,71	(3,98)	2,57	2,08

* *Angka Sementara*

** *Angka Sangat Sementara*

Tabel di atas menunjukkan bahwa pola perkembangan impor Kota Ambon pada periode tahun 2012 sampai dengan 2016 cenderung mengalami peningkatan (baik adh Berlaku maupun adh Konstan 2010), dimana pertumbuhan tercepat terjadi pada tahun 2012 dengan nilai pertumbuhan 21,80 persen. Khusus tahun 2014, terjadi penurunan untuk nilai impor atas dasar harga konstan.

Proporsi impor LN terbesar terjadi pada tahun 2012 sebesar 43,04 persen dan proporsi impor LN terendah terjadi pada tahun 2014 sebesar 35,6 persen. Walaupun nilai impor masih meningkat setiap tahunnya namun jika dilihat dari pertumbuhannya yang semakin mengecil nilainya yang berarti peningkatan nilai impor semakin melambat dan diharapkan akan terus melambat untuk tahun-tahun selanjutnya.

¹² *Diturunkan dari perhitungan PDRB (ADHK 2010)*

3.9. PERKEMBANGAN NET EKSPOR ANTAR DAERAH

Net ekspor antar daerah didefinisikan sebagai ekspor antar daerah dikurangi impor antar daerah. Berbeda dengan penghitungan ekspor-impor barang dan jasa luar negeri, pada penghitungan ekspor-impor antar daerah tidak tersedia sumber data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Sumber data yang tersedia selama ini hanya menunjukkan adanya transaksi namun tidak diketahui berapa nilai uang yang terjadi dalam transaksi tersebut. Keberadaan data dengan kondisi seperti ini menyebabkan penghitungan ekspor-impor antar provinsi menjadikan komponen ini (dalam series PDRB atas dasar harga konstan 2010) diperlakukan sebagai item penyeimbang (residual), yakni perbedaan antara total PDRB menurut pengeluaran dengan total PDRB menurut lapangan usaha. Ketersediaan data yang ada lebih sesuai untuk dimanfaatkan sebagai informasi pendukung.

Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu: ekspor antar daerah dan impor antar daerah. Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor antar daerah juga hasilnya dapat memiliki 2 (dua) angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda “**positif**” berarti nilai ekspor antar daerah lebih besar dari pada impor antar daerah, demikian pula sebaliknya.

Pada saat ini untuk memisahkan net ekspor antar daerah menjadi nilai ekspor antar daerah dan nilai impor antar daerah dilakukan dengan metode tidak langsung, yaitu dengan metode *cross hauling*. Metode ini bekerja dengan memanfaatkan sifat keseimbangan permintaan (*demand*) dan penyediaan (*supply*) setiap komoditas di suatu perekonomian. Penghitung ekspor impor dengan metode *cross-hauling* diawali dengan metode *commodity balance*. Metode *commodity balance* adalah metode penghitungan ekspor-impor dengan memanfaatkan Tabel Input-Output “bayangan”. Dalam metode ini, transaksi ekspor-impor dipandang sebagai item penyeimbang (*balancing item*) dalam keseimbangan *demand* dan *supply* suatu perekonomian.

BAB IV

Perkembangan Agregat PDRB Menurut Pengeluaran Kota Ambon Tahun 2012 – 2016

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1. PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, dimana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, maka disajikan data PDRB per kapita.

PDRB per kapita Kota Ambon menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun (tabel 17), seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kota Ambon rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai per kapita di masing-masing tahun tersebut.

Sementara itu pertumbuhan per kapita secara “riil” juga selalu meningkat di kisaran 1,5 hingga 4 persen. Pertumbuhan per kapita tersebut mengiringi penambahan jumlah penduduk, yang meningkat rata-rata pada kisaran 3 hingga 4 persen setiap tahunnya. Dengan demikian maka pertumbuhan per kapita tersebut tidak saja terjadi secara “riil” tetapi juga terjadi secara kualitas.

Tabel 17. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita Kota Ambon, Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (<i>Juta Rp</i>)					
a. ADHB	7.839.707,29	8.822.995,67	9.931.189,68	11.052.569,13	12.045.480,72
b. ADHK 2010	6.861.334,95	7.274.166,27	7.704.150,15	8.210.004,37	8.701.003,82
PDRB Perkapita (<i>Juta Rp</i>)					
a. ADHB	21,55	23,24	25,12	26,85	28,15
b. ADHK 2010	18,86	19,16	19,48	19,95	20,33
Pertumbuhan					
PDRB ADHK 2010 (%)	8,33	6,02	5,91	6,57	5,98
PDRB Perkapita ADHK 2010 (%)	3,82	1,59	1,68	2,37	1,94
Jumlah Penduduk (<i>jiwa</i>)	363.771	379.615	395.423	411.617	427.934
Pertumbuhan (%)	4,35	4,36	4,16	4,10	3,96

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

4.2. PERBANDINGAN PENGELUARAN PDRB UNTUK KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP EKSPOR

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara produk yang dikonsumsi RT di wilayah domestik dengan produk yang diekspor. Selama ini konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi yang sangat dominan dalam penggunaan PDRB Kota Ambon (lebih dari 50 persen), yang artinya bahwa seluruh produk yang dihasilkan di wilayah Kota Ambon sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Namun di dalamnya termasuk pula sebagian produk yang berasal dari impor.

Tabel 18. Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor, Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (<i>Juta Rp</i>)	4.666.999,75	5.262.640,08	6.074.703,72	6.998.691,95	7.754.538,54
Total Ekspor (<i>Juta Rp</i>)	2.129.065,48	2.276.947,80	2.194.539,86	2.192.354,53	2.170.337,31
Perbandingan Konsumsi RT terhadap Ekspor	2,19	2,31	2,77	3,19	3,57

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Data pada tabel 18 menunjukkan bahwa pada tahun 2012, produk yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga mencapai 2 kali dari yang dieskpor. Hal ini berarti bahwa sebagian besar penyediaan (*supply*) domestik diserap untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir rumah tangga. Rasio tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terjadi pada tahun 2016 (3,57) yang lebih disebabkan karena penurunan nilai ekspor, sementara konsumsi rumah tangga tetap meningkat. Peningkatan dan penurunan tersebut disebabkan oleh perubahan volume maupun harga. Selain itu, peningkatan yang relatif tajam juga disebabkan oleh perbedaan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan ekspor.

4.3. PERBANDINGAN PENGELUARAN PDRB UNTUK KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap). Sekilas nampak bahwa sebagian besar penggunaan produk yang tersedia di wilayah domestik Kota Ambon digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.

Tabel 19. Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap PMTB, Tahun 2012-2016

Uraian (1)	2012 (2)	2013 (3)	2014 (4)	2015* (5)	2016** (6)
Total Konsumsi RT (<i>Juta Rp</i>)	4.666.999,75	5.262.640,08	6.074.703,72	6.998.691,95	7.754.538,54
Total PMTB (<i>Juta Rp</i>)	1.574.755,95	1.752.049,08	1.935.178,00	2.141.476,08	2.373.830,29
Perbandingan Konsumsi RT terhadap PMTB	2,96	3,00	3,14	3,27	3,27

* *Angka Sementara*

** *Angka Sangat Sementara*

Seperti halnya terhadap ekspor, rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB mengalami kenaikan setiap tahunnya. Rasio tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 3,27. Hal ini terjadi karena pertumbuhan nilai investasi selama lima tahun terakhir tidak mampu mengimbangi kecepatan pertumbuhan konsumsi akhir rumah tangga.

4.4. PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Tabel 20. Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir Terhadap PDRB Kota Ambon, Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (Juta Rp)					
a. Rumah Tangga	4.666.999,75	5.262.640,08	6.074.703,72	6.998.691,95	7.754.538,54
b. LNPRT	146.259,47	164.399,55	185.806,69	213.083,09	252.029,49
c. Pemerintah	2.630.586,24	2.831.059,83	3.013.261,00	3.613.287,43	4.057.155,92
Jumlah	7.443.845,46	8.258.099,46	9.273.771,41	10.825.062,47	12.063.723,95
PDRB (ADHB)	7.839.707,29	8.822.995,67	9.931.189,68	11.052.569,13	12.045.480,72
Proporsi	94,95	93,60	93,38	97,94	100,15

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sebagian besar barang dan jasa yang berada di wilayah domestik digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (lebih dari 90 persen). Dalam hal ini, produk yang tidak digunakan menjadi konsumsi akhir (PMTB atau eskpor) memiliki peran yang relatif kecil. Meskipun konsumsi akhir makin meningkat setiap tahunnya, namun proporsinya terhadap PDRB mengalami penurunan pada tahun 2013 dan 2014, disebabkan pertumbuhan konsumsi akhir pada dua tahun tersebut tidak secepat pertumbuhan PDRB.

4.5. PERBANDINGAN EKSPOR TERHADAP PMTB

Ekspor merupakan produk yang tidak dikonsumsi di wilayah domestik, tetapi diperdagangkan ke luar negeri. Untuk menghasilkan produk yang diekspor kemungkinan besar menggunakan kapital (PMTB). Sementara di sisi lain sebagian barang yang diekspor bisa pula berupa barang kapital. Rasio ekspor terhadap PMTB dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan antara nilai produk ekspor dengan nilai produk yang menjadi kapital (PMTB).

**Tabel 21. Rasio Ekspor Terhadap PMTB,
Tahun 2012-2016**

Uraian (1)	2012 (2)	2013 (3)	2014 (4)	2015* (5)	2016** (6)
Ekspor (ADHB) (Juta Rp)	2.129.065,48	2.276.947,80	2.194.539,86	2.192.354,53	2.170.337,31
Total PMTB (ADHB) (Juta Rp)	1.574.755,95	1.752.049,08	1.935.178,00	2.141.476,08	2.373.830,29
Ratio Ekspor terhadap PMTB	1,35	1,30	1,13	1,02	0,91

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Dari tahun 2012 sampai dengan 2015 ekspor mempunyai nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai PMTB. Namun pada tahun 2016 nilai ekspor lebih kecil dari PMTB. Untuk menghasilkan seluruh produk domestik (termasuk ekspor) disyaratkan tersedianya sejumlah kapital (yang didalamnya termasuk pula kapital impor).

4.6. PERBANDINGAN PDRB TERHADAP IMPOR

Rasio ini memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB) dengan produk yang berasal dari impor. Selain itu data tersebut menjelaskan tentang ketergantungan PDRB terhadap produk yang dihasilkan oleh negara lain. Jika rasionya kecil berarti ketergantungan akan impor semakin tinggi, dan sebaliknya.

**Tabel 22. Rasio PDRB Terhadap Impor
Kota Ambon, Tahun 2012-2016**

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHB) (Juta Rp)	7.839.707,29	8.822.995,67	9.931.189,68	11.052.569,13	12.045.480,72
Total Impor (ADHB) (Juta Rp)	3.373.904,35	3.521.205,46	3.535.469,70	4.124.054,19	4.582.835,68
Ratio PDRB terhadap Impor	2,32	2,51	2,81	2,68	2,63

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Rasio PDRB terhadap impor tahun 2012-2016 berada di kisaran nilai 2,3 sampai dengan 2,8. Terjadi peningkatan dari tahun 2012 sampai dengan 2014. Namun kemudian menurun pada tahun berikutnya yaitu menjadi 2,68 (2015) dan kembali menunjukkan penurunan menjadi 2,63 (2016). Rasio tertinggi yang terjadi pada tahun 2014 (2,81), lebih disebabkan peningkatan PDRB yang lebih tinggi dari nilai impor. Peningkatan rasio menunjukkan berkurangnya ketergantungan PDRB terhadap produk impor. Namun dalam dua tahun terakhir rasio PDRB terhadap impor mengalami penurunan yang menunjukkan naiknya ketergantungan PDRB terhadap produk impor.

4.7. KESEIMBANGAN TOTAL PENYEDIAAN DAN TOTAL PERMINTAAN

Rasio ini dapat menunjukkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi suatu daerah oleh produk yang berasal dari impor. Ketergantungan (ketidakseimbangan) tersebut dapat dilihat melalui keseimbangan antara total penyediaan (*supply*) dengan total permintaan akhir (*demand*).

Tabel 23. Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Kota Ambon, Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Penyediaan					
PDRB (ADHB) (<i>Juta Rp</i>)	7.839.707,29	8.822.995,67	9.931.189,68	11.052.569,13	12.045.480,72
%	69,91	71,47	73,75	72,83	72,44
Total Nilai Impor (ADHB) (<i>Juta Rp</i>)					
	3.373.904,35	3.521.205,46	3.535.469,70	4.124.054,19	4.582.835,68
%	30,09	28,53	26,25	27,17	27,56
Total Permintaan Akhir ¹					
	11.213.611,64	12.344.201,13	13.466.659,38	15.176.623,32	16.628.316,40
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa untuk memenuhi permintaan akhir domestik, sebagian produk masih harus didatangkan dari luar negeri dan luar daerah, dengan rentang 27 s.d 30 persen. Dengan kata lain, kebutuhan masyarakat baru bisa dipenuhi sekitar 73 persen dari hasil produksi domestik.

Penyediaan produk barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh ekonomi Kota Ambon sebesar 7.839,7 miliar rupiah pada tahun 2012 dan terus meningkat hingga mencapai nilai 12.045,48 miliar rupiah pada tahun 2016. Sementara total permintaan akhir yang dibutuhkan sebesar 16.628,31 milyar pada tahun 2016. Karena produk domestik tidak mampu mencukupi seluruh kebutuhan permintaan, maka berbagai produk barang dan jasa

¹ Termasuk diskrepansi statistik

diimpor, dengan persentase nilai impor tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 30,09 persen.

4.8. NERACA PERDAGANGAN (TRADE BALANCE)

Transaksi devisa yang berasal dari perdagangan barang dan jasa dengan pihak luar negeri (non-residen) dapat dilihat melalui neraca perdagangan. Secara konsep, selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut sebagai “**Ekspor Neto**”, apabila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka terjadi surplus, dan jika sebaliknya yang terjadi maka merupakan defisit. Dilihat dari arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka terjadi aliran devisa masuk, sebaliknya jika posisinya defisit maka terjadi aliran devisa keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu wilayah diantaranya ditentukan oleh proses tersebut.

Selain gambaran posisi neraca perdagangan, dapat juga dilihat perbandingan (rasio) antara nilai ekspor terhadap impor, meskipun hanya berlaku secara total. Namun rasio tersebut tidak dapat merefleksikan perbandingan menurut jenis komoditas, harga maupun kuantum. Apabila rasio lebih besar dari 1 (satu) maka nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor, sebaliknya apabila rasio kurang dari 1 (satu) berarti nilai impor lebih tinggi dari pada nilai ekspor. Besar kecilnya ekspor atau impor suatu negara sangat tergantung kepada kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakatnya.

**Tabel 24. Neraca Perdagangan Barang dan Jasa
Kota Ambon, Tahun 2012-2016**

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor (ADHB) (Juta Rp)	2.129.065,48	2.276.947,80	2.194.539,86	2.192.354,53	2.170.337,31
Nilai Impor (ADHB) (Juta Rp)	3.373.904,35	3.521.205,46	3.535.469,70	4.124.054,19	4.582.835,68
Net Ekspor (X – M) (Juta Rp)	-1.244.838,87	-1.244.257,66	-1.340.929,84	-1.931.699,66	-2.412.498,37
Ratio Ekspor terhadap Impor	0,63	0,65	0,62	0,53	0,47

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Selama periode 2012 - 2016, posisi perdagangan barang dan jasa Kota Ambon dengan luar negeri dan antar kabupaten, selalu menunjukkan nilai negatif. Hal ini menunjukkan neraca perdagangan barang dan jasa Kota Ambon selalu dalam posisi defisit. Nilai impor yang lebih besar dari ekspor menyebabkan adanya aliran devisa keluar. Defisit perdagangan Kota Ambon yang terjadi antara tahun 2012 sampai dengan 2016 tercatat masing-masing sebesar 1.244,84 miliar rupiah (2012), 1.244,26 miliar rupiah (2013), 1.340,93 miliar rupiah (2014), 1.931,69 miliar rupiah (2015) dan 2.412,49 (2016).

Sementara rasio ekspor terhadap impor cenderung mengalami penurunan dari tahun 2013-2016. Pada tahun 2013 rasionya sebesar 0,65 menjadi 0,47 pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan defisit neraca perdagangan Kota Ambon semakin besar.

<http://ambonkota.bps.go.id>

4.9. RASIO PERDAGANGAN INTERNASIONAL (RPI)

Rasio ini menunjukkan perbandingan aktivitas perdagangan internasional dari suatu wilayah, apakah didominasi oleh ekspor atau impor luar negeri (LN). Formulasinya diperoleh dengan menghitung selisih antara ekspor LN dan impor LN dibagi dengan jumlah ekspor LN dan impor LN. Koefisien RPI berkisar antara -1 s.d + 1 ($-1 < RPI < +1$). Jika RPI berkisar antara 0 dan minus 1, maka perdagangan internasional didominasi oleh impor, sedangkan apabila berkisar antara 0 dan positif 1, maka perdagangan internasional didominasi oleh transaksi ekspor.

**Tabel 25. Ratio Perdagangan Internasional
Kota Ambon, Tahun 2012-2016**

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor LN (ADHB) (Juta Rp)	2.129.065,48	2.276.947,80	2.194.539,86	2.192.354,53	2.170.337,31
Nilai Impor LN (ADHB) (Juta Rp)	3.373.904,35	3.521.205,46	3.535.469,70	4.124.054,19	4.582.835,68
(X – M) (Juta Rp)	-1.244.838,87	-1.244.257,66	-1.340.929,84	-1.931.699,66	-2.412.498,37
(X + M) (Juta Rp)	5.502.969,83	5.798.153,26	5.730.009,56	6.316.408,72	6.753.172,99
RPI	-0,23	-0,21	-0,23	-0,31	-0,36

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa pada periode tahun 2012-2016, posisi ekspor selalu lebih rendah dari impor. Nilai ekspor pada periode tersebut terus menurun dari tahun 2014 sampai dengan 2016, yaitu dari 2194,54 miliar rupiah pada tahun 2014 menjadi 2.170,38 miliar rupiah pada tahun 2016. Untuk impor, nilainya cenderung meningkat setiap tahun.

Rasio Perdagangan Internasional Kota Ambon pada periode 2012-2016 mengindikasikan bahwa perdagangan internasionalnya selalu didominasi oleh kegiatan impor, dengan rasio antara -0,21 hingga -0,36.

4.10. INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

"ICOR" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah *output* (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumberdaya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan *output* adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah".

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap *output* atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai *output* akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. Formula :

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Di mana: I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = *Output* tahun ke t

Y_{t-1} = *Output* tahun ke t-1

**Tabel 26. Incremental Capital Output Ratio
Kota Ambon, Tahun 2012-2016**

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHK 2010) (Juta Rp)	6.861.334,95	7.274.166,27	7.704.150,15	8.210.004,37	8.701.003,82
Perubahan (Juta Rp)	527.757,92	412.831,32	429.983,89	505.854,22	490.999,44
PMTB (ADHK 2010) (Juta Rp)	1.378.109,07	1.577.394,96	1.670.705,96	1.752.065,21	1.830.702,72
ICOR	2,61	3,82	3,89	3,46	3,73

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Data diatas menunjukkan besaran ICOR berfluktuasi setiap tahunnya. Jika dilihat pada tahun 2012 dan 2016, nilai ICOR meningkat dari sebesar 2,61 pada tahun 2012 menjadi 3,73 pada tahun 2016. Hal ini berarti setiap penambahan satu nilai output maka dibutuhkan penambahan sebesar 3,73 unit pada tahun 2016.

BAB V

Penutup

1. PDRB menurut penggunaan tahun 2012 - 2016 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kota Ambon pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk dan rumah tangga), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2012 - 2016, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antar waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan *disposable*, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana.

5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar negeri (*external account*) secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor, dan transfer berjalan (*current tranfer*) neto. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kota Ambon terhadap ekonomi negara lain (*rest of the world*).

<http://ambonkota.bps.go.id>

LAMPIRAN TABEL

<http://ambonkota.bps.go.id>



**Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran, Kota Ambon
Tahun 2012-2016**

(Juta Rp)

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4.666.999,75	5.262.640,08	6.074.703,72	6.998.691,95	7.754.538,54
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	2.537.449,41	2.812.771,91	3.274.008,12	3.803.115,79	4.224.540,16
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	168.426,08	192.911,62	225.430,26	242.681,21	276.446,26
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	489.824,95	569.435,57	647.357,93	723.645,25	810.360,69
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	606.186,63	697.375,25	824.201,51	948.349,09	1.042.293,51
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	530.118,05	602.742,35	669.697,98	778.149,40	854.333,71
1.f. Hotel dan Restoran	215.216,79	251.044,53	275.041,10	322.403,83	345.938,61
1.g. Lainnya	119.777,84	136.358,83	158.966,83	180.347,38	200.625,60
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	146.259,47	164.399,55	185.806,69	213.083,09	252.029,49
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.630.586,24	2.831.059,83	3.013.261,00	3.613.287,43	4.057.155,92
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.574.755,95	1.752.049,08	1.935.178,00	2.141.476,08	2.373.830,29
4.a. Bangunan	1.150.606,33	1.299.585,53	1.432.349,12	1.570.755,71	1.732.386,70
4.b. Non-Bangunan	424.149,62	452.463,56	502.828,88	570.720,37	641.443,59
5. Perubahan Inventori	65.944,75	57.104,80	63.170,11	17.730,24	20.424,85
6. Ekspor	2.129.065,48	2.276.947,80	2.194.539,86	2.192.354,53	2.170.337,31
7. Impor	3.373.904,35	3.521.205,46	3.535.469,70	4.124.054,19	4.582.835,68
PDRB	7.839.707,29	8.822.995,67	9.931.189,68	11.052.569,13	12.045.480,72

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran, Kota Ambon
Tahun 2012-2016**

(Juta Rp)

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3.974.734,45	4.169.048,79	4.493.362,49	4.783.714,47	5.075.954,66
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	2.090.881,16	2.190.946,81	2.390.832,64	2.535.272,34	2.728.538,37
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	151.987,10	159.031,75	171.246,92	180.570,06	194.038,24
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	416.407,22	441.808,14	466.434,73	492.625,91	525.239,27
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	537.067,84	560.952,15	604.533,77	649.533,90	665.726,04
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	480.086,68	503.539,31	530.320,41	571.398,73	606.272,53
1.f. Hotel dan Restoran	188.410,11	198.944,63	209.226,71	226.686,28	223.939,83
1.g. Lainnya	109.894,34	113.826,00	120.767,31	127.627,24	132.200,39
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	134.644,66	140.591,71	152.684,05	164.481,28	180.568,32
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.216.960,12	2.364.577,51	2.470.474,04	2.719.323,31	2.905.293,68
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.378.109,07	1.577.394,96	1.670.705,96	1.752.065,21	1.830.702,72
4.a. Bangunan	971.907,88	1.147.734,90	1.225.920,75	1.280.115,11	1.336.707,66
4.b. Non-Bangunan	406.201,19	429.660,06	444.785,21	471.950,10	493.995,06
5. Perubahan Inventori	62.960,41	44.725,55	49.882,46	12.226,16	13.428,21
6. Ekspor	2.070.340,45	2.094.380,41	1.859.606,96	1.847.656,46	1.828.380,14
7. Impor	2.976.414,21	3.116.552,68	2.992.565,81	3.069.462,51	3.133.323,92
PDRB	6.861.334,95	7.274.166,27	7.704.150,15	8.210.004,37	8.701.003,82

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Tabel 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar
Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Ambon
Tahun 2012-2016**

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	59,53	59,65	61,17	63,32	64,38
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	32,37	31,88	32,97	34,41	35,07
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	2,15	2,19	2,27	2,20	2,30
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	6,25	6,45	6,52	6,55	6,73
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	7,73	7,90	8,30	8,58	8,65
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	6,76	6,83	6,74	7,04	7,09
1.f. Hotel dan Restoran	2,75	2,85	2,77	2,92	2,87
1.g. Lainnya	1,53	1,55	1,60	1,63	1,67
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,87	1,86	1,87	1,93	2,09
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	33,55	32,09	30,34	32,69	33,68
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	20,09	19,86	19,49	19,38	19,71
4.a. Bangunan	14,68	14,73	14,42	14,21	14,38
4.b. Non-Bangunan	5,41	5,13	5,06	5,16	5,33
5. Perubahan Inventori	0,84	0,65	0,64	0,16	0,17
6. Ekspor Luar Negeri	27,16	25,81	22,10	19,84	18,02
7. Impor Luar Negeri	43,04	39,91	35,60	37,31	38,05
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Tabel 4. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar
Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Ambon
Tahun 2012-2016**
(Persen)

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	57,93	57,31	58,32	58,27	58,34
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	30,47	30,12	31,03	30,88	31,36
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	2,22	2,19	2,22	2,20	2,23
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	6,07	6,07	6,05	6,00	6,04
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	7,83	7,71	7,85	7,91	7,65
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	7,00	6,92	6,88	6,96	6,97
1.f. Hotel dan Restoran	2,75	2,73	2,72	2,76	2,57
1.g. Lainnya	1,60	1,56	1,57	1,55	1,52
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,96	1,93	1,98	2,00	2,08
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	32,31	32,51	32,07	33,12	33,39
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	20,09	21,68	21,69	21,34	21,04
4.a. Bangunan	14,16	15,78	15,91	15,59	15,36
4.b. Non-Bangunan	5,92	5,91	5,77	5,75	5,68
5. Perubahan Inventori	0,92	0,61	0,65	0,15	0,15
6. Ekspor Luar Negeri	30,17	28,79	24,14	22,50	21,01
7. Impor Luar Negeri	43,38	42,84	38,84	37,39	36,01
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Tabel 5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar
Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Ambon
Tahun 2013-2016**
(Persen)

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	12,76	15,43	15,21	10,80
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	10,85	16,40	16,16	11,08
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	14,54	16,86	7,65	13,91
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	16,25	13,68	11,78	11,98
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	15,04	18,19	15,06	9,91
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	13,70	11,11	16,19	9,79
1.f. Hotel dan Restoran	16,65	9,56	17,22	7,30
1.g. Lainnya	13,84	16,58	13,45	11,24
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	12,40	13,02	14,68	18,28
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,62	6,44	19,91	12,28
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	11,26	10,45	10,66	10,85
4.a. Bangunan	12,95	10,22	9,66	10,29
4.b. Non-Bangunan	6,68	11,13	13,50	12,39
5. Perubahan Inventori	-13,41	10,62	-71,93	15,20
6. Ekspor Luar Negeri	6,95	-3,62	-0,10	-1,00
7. Impor Luar Negeri	4,37	0,41	16,65	11,12
PDRB	12,54	12,56	11,29	8,98

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 6. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Ambon Tahun 2013-2016

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,89	7,78	6,46	6,11
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	4,79	9,12	6,04	7,62
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	4,64	7,68	5,44	7,46
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	6,10	5,57	5,62	6,62
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	4,45	7,77	7,44	2,49
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	4,89	5,32	7,75	6,10
1.f. Hotel dan Restoran	5,59	5,17	8,34	-1,21
1.g. Lainnya	3,58	6,10	5,68	3,58
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	4,42	8,60	7,73	9,78
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6,66	4,48	10,07	6,84
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	14,46	5,92	4,87	4,49
4.a. Bangunan	18,09	6,81	4,42	4,42
4.b. Non-Bangunan	5,78	3,52	6,11	4,67
5. Perubahan Inventori	-28,96	11,53	-75,49	9,83
6. Ekspor	1,16	-11,21	-0,64	-1,04
7. Impor	4,71	-3,98	2,57	2,08
PDRB	6,02	5,91	6,57	5,98

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Tabel 7. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Ambon
Tahun 2012-2016
(2010=100)**

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	131,52	148,30	171,18	197,22	218,52
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	141,53	156,89	182,61	212,13	235,63
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	124,13	142,18	166,15	178,86	203,75
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	129,48	150,52	171,12	191,29	214,21
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	127,43	146,60	173,26	199,36	219,11
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	104,34	118,63	131,81	153,15	168,15
1.f. Hotel dan Restoran	128,68	150,11	164,45	192,77	206,84
1.g. Lainnya	131,98	150,25	175,16	198,72	221,06
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	117,42	131,99	149,17	171,07	202,34
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	142,24	153,08	162,93	195,38	219,38
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	160,85	178,96	197,66	218,74	242,47
4.a. Bangunan	158,84	179,41	197,74	216,85	239,16
4.b. Non-Bangunan	166,56	177,68	197,46	224,12	251,89
5. Perubahan Inventori	143,06	123,88	137,04	38,46	44,31
6. Ekspor Luar Negeri	130,52	139,59	134,53	134,40	133,05
7. Impor Luar Negeri	148,82	155,32	155,95	181,91	202,14
PDRB	132,61	149,24	167,99	186,96	203,75

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Tabel 8. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Ambon
Tahun 2012-2016
(2010=100)**

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	112,01	117,48	126,62	134,80	143,04
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	116,62	122,20	133,35	141,41	152,19
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	112,02	117,21	126,21	133,08	143,01
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	110,07	116,79	123,30	130,22	138,84
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	112,90	117,92	127,08	136,54	139,95
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	94,49	99,10	104,38	112,46	119,32
1.f. Hotel dan Restoran	112,65	118,95	125,10	135,54	133,90
1.g. Lainnya	121,09	125,42	133,07	140,63	145,67
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	108,10	112,87	122,58	132,05	144,97
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	119,88	127,86	133,58	147,04	157,10
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	140,76	161,12	170,65	178,96	186,99
4.a. Bangunan	134,17	158,45	169,24	176,72	184,53
4.b. Non-Bangunan	159,51	168,72	174,66	185,33	193,99
5. Perubahan Inventori	136,58	97,02	108,21	26,52	29,13
6. Ekspor Luar Negeri	126,92	128,39	114,00	113,27	112,09
7. Impor Luar Negeri	131,29	137,47	132,00	135,39	138,21
PDRB	116,06	123,05	130,32	138,88	147,18

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Tabel 9. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto
Menurut Pengeluaran, Kota Ambon
Tahun 2012-2016
(2010=100)**

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	117,42	126,23	135,19	146,30	152,77
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	121,36	128,38	136,94	150,01	154,83
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	110,82	121,30	131,64	134,40	142,47
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	117,63	128,89	138,79	146,90	154,28
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	112,87	124,32	136,34	146,00	156,56
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	110,42	119,70	126,28	136,18	140,92
1.f. Hotel dan Restoran	114,23	126,19	131,46	142,22	154,48
1.g. Lainnya	108,99	119,80	131,63	141,31	151,76
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	108,63	116,93	121,69	129,55	139,58
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	118,66	119,73	121,97	132,87	139,65
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	114,27	111,07	115,83	122,23	129,67
4.a. Bangunan	118,39	113,23	116,84	122,70	129,60
4.b. Non-Bangunan	104,42	105,31	113,05	120,93	129,85
5. Perubahan Inventori	104,74	127,68	126,64	145,02	152,10
6. Ekspor Luar Negeri	102,84	108,72	118,01	118,66	118,70
7. Impor Luar Negeri	113,35	112,98	118,14	134,36	146,26
PDRB	114,26	121,29	128,91	134,62	138,44

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Tabel 10. Laju Pertumbuhan Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut
Pengeluaran, Kota Ambon
Tahun 2013-2016
(Persen)**

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	9,87	7,51	7,10	8,22
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	12,52	5,79	6,67	9,54
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	2,04	9,46	8,52	2,09
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	10,36	9,57	7,68	5,84
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	6,82	10,14	9,67	7,09
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	4,68	8,40	5,50	7,84
1.f. Hotel dan Restoran	7,25	10,47	4,17	8,19
1.g. Lainnya	9,02	9,91	9,88	7,35
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3,59	7,65	4,07	6,45
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0,71	0,90	1,87	8,94
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	9,94	(2,80)	4,28	5,52
4.a. Bangunan	12,72	(4,36)	3,19	5,02
4.b. Non-Bangunan	3,12	0,85	7,35	6,97
5. Perubahan Inventori	(3,95)	21,90	(0,81)	14,51
6. Ekspor Luar Negeri	6,99	5,72	8,55	0,55
7. Impor Luar Negeri	7,19	(0,33)	4,57	13,73
PDRB	6,49	6,16	6,28	4,43

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

— *Enlighten The Nation* —

<http://ambonkota.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA AMBON**

BPS- Statistics of Ambon Municipality

Jln. Haruhun (Komplek Puleh) Kel. Waihoka - Ambon 97128

Telp/Fax : (0911) 352774, 312421

Homepage : <http://ambonkota.bps.go.id>

Email : bps8171@bps.go.id



9 772528 130002